

Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

No	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RPD	INDIKATOR KINERJA PERINDAG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD
					RPD	2023	2024	2025	2026	RPD
	Meningkatnya ekonomi Daerah		Pertumbuhan PDRB		5,05	4,28	4,39	4,46	4,78	5,78
		Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		-5,64	1,86	3,25	4,50	4,55	4,55
				Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	2,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,00
				Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)	14,500	15,250	16,000	16,750	17,500	17,500
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan		-4,62	6,50	4,94	5,50	5,55	5,55
				Presentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	2,00	2,50	2,75	3,00	3,25	3,25
				Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)	11,750	12,250	12,900	13,550	14,200	14,200
	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.		Indeks Reformasi Birokrasi		66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
				Predikat RB Perangkat Daerah		67	67	67	67	67
				Nilai RB Perangkat Daerah		67	67	67	67	67



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 - 439 093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 - 439093

email : perindag@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/004/SK/DISPERINDAG/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2017 Nomor 3 Seri E);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 45 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 09 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



Drs. H. TARMIN , M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Bidang Penanggung jawab
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Triliyun (Rp)	14,500	15,250	16,000	16,750	17,500	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)	Dinas Perindag UPTD RPK	
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan Triliyun (Rp)	14,500	12,250	12,900	13,550	14,200	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)	Dinas Perindag UPTD BPSMB UPTD RPK	

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TARMIN
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Pj. GUBENUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Safrizal ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si
NIP. 196811111990091001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	FORMULA PENGHITUNGAN TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Triliyun (Rp)	16.000	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan Triliyun (Rp)	12.900	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)

Anggaran : Rp. 3.778.131.771

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 790.236.963	APBD
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (UPTD. RPK)	Rp. 692.000.000	APBD
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 0	APBD
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 103.990.900	APBD
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 39.690.600	APBD
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 205.235.100	APBD
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 254.081.088	APBD
		Program Pengembangan Ekspor	Rp. 256.646.500	APBD
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 367.197.600	APBD
		Program Standardisasi	Rp. 542.061.900	APBD

		Dan Perlindungan Konsumen (UPTD. BPSMB)		
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 160.996.384	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD. RPK)	Rp. 365.994.736	APBD
TAMBAHAN : Rp. 19.911.413.294				
1.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 18.964.945.074	APBD
2.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. BPSMB)	Rp. 309.589.020	APBD
3.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. RPK)	Rp. 636.879.200	APBD
PENDUKUNG : Rp. 1.540.217.000				
1		Program Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 450.486.000	APBN
2		Program Perdagangan Luar Negeri	Rp. 162.163.000	APBN
3		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 927.568.000	APBN

Pangkalpinang, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Pj. GUBENUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Safrizal ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN, M.Si
NIP. 19681111990091001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 - 439 093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 - 439093

email : perindag@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/107/SK/DISPERINDAG/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 188.4/004/SK.DISPERINDAG/2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu “ menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024-2026 pada Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 45 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Juni 2024

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



Drs. H. TARMIN , M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 188.4/107 SK/DISPERINDAG/2024
TANGGAL : 27 Juni 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET				Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Bidang Penanggung jawab
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Triliyun (Rp)	14,500	15,250	21,750	21,800	21,850	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)	Dinas Perindag UPTD RPK
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan Triliyun (Rp)	14,500	12,250	16,150	16,200	16,250	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)	Dinas Perindag UPTD BPSMB UPTD RPK

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 188.4/107 SK/DISPERINDAG/2024
TANGGAL : 27 Juni 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET				Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Bidang Penanggung jawab
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Triliyun (Rp)	14,500	15,250	21,750	16,750	17,750	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)	Dinas Perindag UPTD RPK
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan Triliyun (Rp)	14,500	12,250	16,150	13,550	14,200	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)	Dinas Perindag UPTD BPSMB UPTD RPK

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : perindag@babelprov.go.id, Website :
<http://perindag.babelprov.go.id>

BERITA ACARA

Nomor : BA-108/DISPERINDAG/PK/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2024 (terlampir).

Demikian Berita Acara penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2024 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TARMIN
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
Jabatan : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2024

PIHAK KEDUA
Pj. GUBENUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGITO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG,



TARMIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Triliyun (Rp)	21,750	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan Triliyun (Rp)	16,150	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)

Anggaran : Rp 23.077.608.564

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 503.909.700	APBDP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (UPTD. RPK)	Rp. 532.154.000	APBDP
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 0	APBDP
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 26.970.500	APBDP
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 11.671.500	APBDP
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 110.219.300	APBDP
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 102.178.200	APBDP
		Program Pengembangan Ekspor	Rp. 0	APBDP
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 258.790.400	APBDP

	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (UPTD. BPSMB)	Rp. 449.789.100	APBDP
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 38.472.388	APBDP
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD. RPK)	Rp. 283.994.842	APBDP

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan) : Rp 20.759.458.634

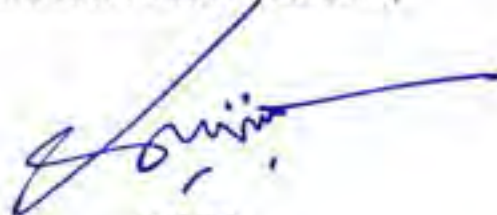
NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 20.232.789.494	APBDP
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. BPSMB)	Rp. 270.333.540	APBDP
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. RPK)	Rp. 256.335.600	APBDP

Pendukung : Rp 1.540.217.000

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perdagangan Dalam Negeri	Rp 450.486.000	APBN
2.	Program Perdagangan Luar Negeri	Rp 162.163.000	APBN
3.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 927.568.000	APBN

Pangkalpinang, November 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUGITO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



TARMIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN I						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW I	REALISASI KINERJA TW I ⁽¹⁾	PERSENTASE CAPAIAN TW I	PENJELASANAN PROGRES TW I	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW I	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun (Rp)	21,750	5,438	4,952	91,07%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri o Program Pengendalian Izin Usaha Industri o Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (RPK) 	22,77%	12,45%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri o Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri o UPTD RPK
								Penjelasan Progres: adanya penurunan signifikan pada produksi logam timah maupun bijih timah sebagai bahan baku logam timah. Jumlah Capaian = 4,952			
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun (Rp)	16,150	4,038	4,031	99,84%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan o Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan o Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting o Program Pengembangan Ekspor o Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 	24,96%	5,47%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor o Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen o UPTD BPSMB o UPTD RPK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN I						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW I	REALISASI KINERJA TW I (%)	PERSENTASE CAPAIAN TW I	PENJELASANAN PROGRES TW I	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW I	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<ul style="list-style-type: none"> o Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (BPSMB) o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK) 			
								Penjelasan Progres: disebabkan tidak adanya ekspor logam timah ke luar negeri selama bulan Januari-Februari. Jumlah Capaian = 4,031			

(*) Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I-2024
BRS No. 37/05/19/Th. XXII, 6 Mei 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN, M.Si
196811111990091001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN II						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW II	REALISASI KINERJA TW II ⁽¹⁾	PERSENTASE CAPAIAN TW II	PENJELASANAN PROGRES TW II	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW II	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun (Rp)	21,750	5,438	5,460	100,42%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri o Program Pengendalian Izin Usaha Industri o Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (RPK) 	47,87%	27,25%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Pengendalian dan Fasilitas Usaha Industri o Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri o UPTD RPK
								Penjelasan Progres: <ul style="list-style-type: none"> o Triwulan I 4,952 o Triwulan II 5,460 Jumlah Capaian = 10,412			
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun (Rp)	16,150	4,038	4,033	99,88%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan o Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan o Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting o Program Pengembangan Ekspor o Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri o Program Standardisasi 	49,93%	21,49%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor o Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen o UPTD BPSMB o UPTD RPK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN II						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW II	REALISASI KINERJA TW II (*)	PERSENTASE CAPAIAN TW II	PENJELASANAN PROGRES TW II	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW II	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dan Perlindungan Konsumen (BPSMB) o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK)			
								Penjelasan Progres: Imbas dari permasalahan tata kelola timah yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir o Triwulan I 4,031 o Triwulan II 4,033 Jumlah Capaian = 8,064			

(*) Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II-2024
BRS No. 57/08/19/Th. XXII, 5 Agustus 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN, M.Si
196811111990091001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN III						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW III	REALISASI KINERJA TW III (°)	PERSENTASE CAPAIAN TW III	PENJELASANAN PROGRES TW III	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW III	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun (Rp)	21,750	5,438	5,743	105,63%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri o Program Pengendalian Izin Usaha Industri o Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (RPK) 	74,28%	40,31%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri o Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri o UPTD RPK
								Penjelasan Progres: <ul style="list-style-type: none"> o Triwulan I 4,952 o Triwulan II 5,460 o Triwulan III 5,743 Jumlah Capaian = 16,155			
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun (Rp)	16,150	4,038	4,038	100,01%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan o Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan o Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting o Program Pengembangan Ekspor o Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri o Program Standardisasi dan Perlindungan 	74,93%	40,44%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor o Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen o UPTD BPSMB o UPTD RPK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN III						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW III	REALISASI KINERJA TW III (*)	PERSENTASE CAPAIAN TW III	PENJELASANAN PROGRES TW III	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW III	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Konsumen (BPSMB) o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK)			
								Penjelasan Progres: o Triwulan I 4,031 o Triwulan II 4,033 o Triwulan III 4,038 Jumlah Capaian = 12,102			

(*) Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III-2024
BRS No. 74/11/19/Th. XXII, 5 November 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN, M.Si
196811111990091001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN IV						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW IV	REALISASI KINERJA TW IV ^(*)	PERSENTASE CAPAIAN TW IV	PENJELASANAN PROGRES TW IV	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW IV	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun (Rp)	21,750	5,438	5,987	110,10%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri o Program Pengendalian Izin Usaha Industri o Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (RPK) 	101,80%	97,17%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri o Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri o UPTD RPK
								Penjelasan Progres: Triwulan I 4,952 Triwulan II 5,460 Triwulan III 5,743 Triwulan IV 5,987 Jumlah Capaian = 22,142			
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun (Rp)	16,150	4,038	4,413	109,31%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan o Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan o Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting o Program Pengembangan Ekspor o Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri o Program Standardisasi dan Perlindungan 	102,26%	91,53%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor o Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen o UPTD BPSMB o UPTD RPK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN IV						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW IV	REALISASI KINERJA TW IV (*)	PERSENTASE CAPAIAN TW IV	PENJELASANAN PROGRES TW IV	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW IV	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Konsumen (BPSMB) o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK)			
								Penjelasan Progres: o Triwulan I 4,031 o Triwulan II 4,033 o Triwulan III 4,038 o Triwulan IV 4,413 Jumlah Capaian = 16,515			

(*) Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2024
BRS No. 13/02/19/Th. XXIII, 5 Februari 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT DAERAH

KEMPLEK PERKANTORAN DAN PERBUKUMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
R. BELAU BELITUNG KEL. AIR ITAM TELP. 0771-4951145-4951146

Pangkalpinang, 05 April 2024

Nomor : 700/107 /LHE/ITDA/2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di -
Pangkalpinang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Plt.Inspektor a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/14.f/REV-ITDA/2024 tanggal 04 Maret 2024 hal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Ruang lingkup evaluasi
Ruang lingkup evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja; dan
 - d. Evaluasi AKIP.

3. Metodologi dan Teknik Evaluasi

- Metodologi evaluasi SAKIP dilakukan dengan cara kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).
- Teknik evaluasi yang digunakan, antara lain checklist pengumpulan data informasi, komunikasi melalui Aplikasi e-SAKIP, tanya dan jawab sederhana, observasi, studi dokumentasi.

4. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan nilai sebesar 74,15 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja 'Memuaskan', yaitu terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25	10,95
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00	15,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,35	74,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB
	Interpretasi : Sangat Baik			

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dengan bobot 30 % dari 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi penilaian atas dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan

hasil yang berkesinambungan. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 24,60 dari bobot 30,00 yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dokumen perencanaan kinerja yaitu pemenuhan dokumen berupa pedoman teknis perencanaan kinerja, Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mendapat nilai 5,40 dari bobot 6,00.

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan telah memenuhi standar yang baik dengan nilai 7,20 dari bobot 9,00 dengan uraian sebagai berikut :

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu;
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
- c) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai;
- d) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*cross cutting*);
- g) Setiap Unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
- h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen perencanaan dengan nilai 12,00 dari bobot 15,00, hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Anggaran ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik;
- d) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.

- e) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- f) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
- g) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- h) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja dengan bobot 30 % dari 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan nilai 23,10 dari bobot 30,00 yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dokumen pengukuran kinerja dengan nilai 5,40 dari bobot 6,00, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan cara mengukur indikator kinerja (formula) dan telah memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja dalam Standar Operasional Prosedur.

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas pengukuran kinerja dengan nilai 7,20 dari bobot 9,00, hal ini menunjukkan bahwa pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja, pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)

Namun masih terdapat kelemahan, yaitu :

- a) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan; dan
- b) Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan pengukuran kinerja dengan nilai 10,50 dari bobot 15,00, hal ini menunjukkan bahwa:

- a) Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- d) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
- e) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; dan
- f) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Namun Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya:

- a) Mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- b) Dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15% dari total 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, bahwa pelaporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta ada upaya untuk perbaikan/penyempurnaan kinerja yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja. Evaluasi terhadap laporan kinerja mendapatkan nilai 10,95 dari bobot 15,00, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja dengan nilai 2,40 dari bobot 3,00, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen laporan kinerja yang disusun secara berkala, telah diformalkan, telah dilakukan reviu secara internal dan disampaikan secara tepat waktu, serta telah dipublikasikan dalam Aplikasi e-SAKIP.

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas laporan kinerja dengan nilai 4,05 dari bobot 4,50, hal ini menunjukkan bahwa Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Namun Laporan Kinerja belum

sepenuhnya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap kualitas laporan kinerja dengan nilai 4,50 dari bobot 7,50 hal ini menunjukkan bahwa Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja serta selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Namun Laporan Kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi atas komponen Evaluasi Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25% dari total 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi berupa evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dan dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Evaluasi terhadap evaluasi kinerja mendapatkan nilai 15,50 dari bobot 25,00, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 3,50 dari bobot 5,00, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki SOP pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dijadikan standar untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, namun belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

2) Kualitas

Hasil evaluasi atas kualitas akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 4,50 dari bobot 7,50, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar.

Namun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- a) Belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai; dan

- b) Belum sepenuhnya menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi)

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas kualitas akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 7,50 dari bobot 12,50, hal ini menunjukkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa :

- a) Belum sepenuhnya rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti; dan
- b) Belum sepenuhnya hasil evaluasi kinerja meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah diuraikan di atas, Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar kedepannya melakukan perbaikan terhadap LAKIP supaya:

- a. Data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- b. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- c. Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
- d. Pengukuran Kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- e. Laporan Kinerja agar sepenuhnya:
 - 1) Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional, dan
 - 2) Menjadi kepedulian seluruh pegawai
- f. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja agar:
 - 1) Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
 - 2) Dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
 - 3) Menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi); dan
 - 4) Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti untuk meningkatkan implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP secara utuh di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pit.INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUSANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 1963061211985031001

Tembusan:

- 1) Menteri PAN dan RB;
- 2) Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan				A	70	hasil penilaian informasi dari hasil pengumpulan di atas (2.1-3)	LSKP DFP	https://www.kemendagri.go.id/portal/
3.c. Pelaporan Kinerja telah memberikan				7,50	CC	4,50		
Kriteria					88,57			
1. Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan				BB	80	penjelasan apakah pimpinan memberikan contoh berupa	Stratagem dan daftar hasil capai	https://www.kemendagri.go.id/portal/
2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				BB	80	kemudahan data dan penyajian data/kinerja dikomputerisasi	1. Surattema dan daftar hasil capai	https://www.kemendagri.go.id/portal/
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan				BB	80	tidak	LSKP Triwulanan pada BAB II	https://www.kemendagri.go.id/portal/
5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian				BB	8000,00%	tidak	LSKP Triwulanan pada BAB II	https://www.kemendagri.go.id/portal/
6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan				BB	80	tidak	LSKP pada BAB IV (Rekomendasi)	https://www.kemendagri.go.id/portal/
7. Informasi dalam laporan kinerja sebagai pemangkas/penerbit perubahan budaya kinerja				BB	80	struktur penilai untuk membantu lebih, penyajian informasi	(laporan) sebagai KPI Tahun 2022-23	https://www.kemendagri.go.id/portal/
4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				25,00		15,50		
4.a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				5,00	B	3,50		
Kriteria					76,67			
1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				BB	80	tidak	SE Kepala Dinas tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	https://www.kemendagri.go.id/portal/
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan				BB	80	hasil evaluasi satu per satu akan dan diikutinya penyempurnaan atau dilakukan berdasarkan SP5DM sebagai acuan untuk perbaikan	1. Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan 2. Monitoring Evaluasi Kinerja Evaluasi 1, 2, 3 dan 4	https://www.kemendagri.go.id/portal/
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang				B	70	Penyusunan penyempurnaan evaluasi sebagai apa sesuai mekanisme yang dibutuhkan	Laporan Kinerja serta Monitoring Evaluasi perubahan kinerja pegawai	https://www.kemendagri.go.id/portal/
4.b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai				7,50	CC	4,50		
Kriteria					66,60			
1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara standar				B	70	tidak ada monitoring dan ditinjau berapa persen tugas yang sudah selesai	Berita Berita Evaluasi Mandiri	https://www.kemendagri.go.id/portal/
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai				B	70	Apakah evaluasi dilaksanakan oleh SDM yang telah memahami kinerja?	Program Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan/dilaksanakan/berkualitas/analisis/penugasan evaluasi SAKIP	https://www.kemendagri.go.id/portal/
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai				CC	60	- Apabila seluruh komponen/kriteria dilakukan pendalaman yang memadai (apabila dalam evaluasi membandingkan antara kondisi existing dengan kondisi ideal, dan melakukan analisis permasalahan/penyebab dari gap yang ada) - Laporan evaluasi (LRA) dari pedoman evaluasi internal yang disusun masing-masing instansi pemerintah	Berita Berita Evaluasi Mandiri	https://www.kemendagri.go.id/portal/
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan				CC	60	Sama dengan poin 4 a 2, tapi bisa dihapus	Berita Berita Evaluasi Mandiri	https://www.kemendagri.go.id/portal/
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Apikasi)				B	70	tidak	Survey (hasil) aplikasi e-SAKIP	https://www.kemendagri.go.id/portal/
4.c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam elektiditas dan efisiensi Kinerja				12,50	CC	7,50		
Kriteria					4800,00%			
1. Seluruh rekomendasi atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti				B	70	1. Apakah rekomendasi telah ditindaklanjuti? Berapa persen? 2. Apakah rekomendasi rekomendasi telah menjadi perhatian kriteria di komponen perencanaan pengukutan dan pelaksanaan?	Bukti tidak lanjut rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal	https://www.kemendagri.go.id/portal/
2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atau rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal				B	70	tidak	Bukti pemenuhan implementasi SAKIP pada DFP	https://www.kemendagri.go.id/portal/

**RENCANA AKSI TINDAKLANJUT REKOMENDASI LHE AKIP INTERNAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2024**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	REALISASI				LINK DOKUMEN BUKTI DUKUNG
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1.	Data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Rapat internal untuk capaian kinerja pada akan melakukan PK perubahan	PK Perubahan, notulen, foto dan absensi rapat	Oktober 2024	Sudah Diselesaikan				PK Perubahan 2024	https://bit.ly/40HDoKk
2.	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Membuat Tabel Capaian dan Realisasi Rencana Aksi Triwulan	Tabel Monev Rencana Aksi Triwulan	April 2024 - Januari 2025	Sudah Diselesaikan	Tabel Monev Rencana Aksi TW I TA 2024 Disperindag	Tabel Monev Rencana Aksi TW II TA 2024 Disperindag	Tabel Monev Rencana Aksi TW III TA 2024 Disperindag	Tabel Monev Rencana Aksi TW IV TA 2024 Disperindag	https://bit.ly/40HDoKk
		Membuat Tabel Capaian dan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan	Tabel Capaian dan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan	Februari 2024 - Januari 2025	Sudah Diselesaikan	Tabel Capaian dan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Januari - Maret	Tabel Capaian dan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan April - Juni	Tabel Capaian dan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Juni - September	Tabel Capaian dan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Oktober - Desember	https://bit.ly/40HDoKk
3.	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Surat Edaran Kepala Dinas tentang pencapaian kinerja akan dijadikan sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Surat Edaran Kepala Dinas	Oktober 2024	Sudah Diselesaikan				PK Perubahan 2024	https://bit.ly/40HDoKk
4.	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Analisis dan Evaluasi Capaian dan Realisasi Rencana Aksi Triwulan	APBD Perubahan 2024	Oktober 2024	Sudah Diselesaikan				PK Perubahan 2024	https://bit.ly/40HDoKk
		Rapat internal untuk capaian kinerja pada akan melakukan PK perubahan	PK Perubahan, notulen, foto dan absensi rapat	Oktober 2024	Sudah Diselesaikan				PK Perubahan 2024	https://bit.ly/40HDoKk
5.	Laporan kinerja agar sepenuhnya:									
	1) Menginformasikan analisis dan evaluasi	Rapat internal analisis dan evaluasi capaian realiasi	Notulen, foto dan absensi	Januari 2025	Sudah Diselesaikan				Rapat Internal Dalev	https://bit.ly/40HDoKk

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	REALISASI				LINK DOKUMEN BUKTI DUKUNG
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
	realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional, dan	kinerja organisasi	rapat						TW IV, LKLPJ, LAKIP dll	40HDoKk
	2) Menjadi kepedulian seluruh pegawai	Rapat internal analisis dan evaluasi capaian realiasi kinerja organisasi	Notulen, foto dan absensi rapat	Januari 2025	Sudah Diselesaikan				Rapat Internal Dalev TW IV, LKLPJ, LAKIP dll	https://bit.ly/40HDoKk
6.	Evaluasi akuntabilitas kinerja agar:									
	1) Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas	Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas atas hasil evaluasi akuntabilitas organisasi	SK Kepala Dinas	Januari 2025	Sudah Diselesaikan				Rapat Internal Dalev TW IV, LKLPJ, LAKIP dll	https://bit.ly/40HDoKk
	2) Dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	Rapat internal terkait hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan tindaklanjut hasil rekomendasi	Notulen, foto dan absensi rapat	Januari 2025	Sudah Diselesaikan				Rapat Internal Dalev TW IV, LKLPJ, LAKIP dll	https://bit.ly/40HDoKk
	3) Menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi); dan	Menggunakan aplikasi Sistem Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Sakip Terintegrasi	Aplikasi Sipena Sakti	April 2024 - Januari 2025	Sudah Diselesaikan	Tabel Lampiran F10 Dalev-Dinas Perindag	Tabel Lampiran F10 Dalev-Dinas Perindag	Tabel Lampiran F10 Dalev-Dinas Perindag	Tabel Lampiran F10 Dalev-Dinas Perindag	https://bit.ly/40HDoKk
	4) Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindak lanjuti untuk meningkatkan implementasi SAKIP.	Rapat internal terkait hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan tindaklanjut hasil rekomendasi	Notulen, foto dan absensi rapat	Januari 2025	Sudah Diselesaikan				Rapat Internal Dalev TW IV, LKLPJ, LAKIP dll	https://bit.ly/40HDoKk

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023

1. Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



2. Dukungan dalam memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM



3. Daerah Peduli Perlindungan Konsumen Tahun 2024



4. Mitra Strategis Terbaik dalam Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



